

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Amiruddin, dan Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Arba. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah (Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Fakih, Mansour R. *Tanah, Rakyat dan Demokrasi*. Yogyakarta: Forum LSM-LPSM DIY. 1995.
- Hadikusuma, Hilman. *Pokok-pokok pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni. 1980.
- Limbong, Benhard. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka. 2017.
- Rubaie, Achmad. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia. 2007.
- Salindeho, John. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Sodiki, Ahmad. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press(Konpress).2012.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1982.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).1986.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.2012.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Syah, Mudakir Iskandar. *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum: Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2014.

Yunus Wahid A.M. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta:Kencana Prenada Media Grup. 2014.

Zaman, Nurus. *Politik Hukum Pengadaan Tanah: Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama. 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030.

MEDIA MASSA DAN INTERNET

BIN 016/017. 2017. *“Tak Puas dengan Sikap Pemko, Warga Blokir Jalan RTH Bendungan Talawi”*. BAKINews, 25 September 2017.

<https://sumbar.auditpos.com/2017/01/29/pemko-payakumbuh-serobot-tanah-warga/> (diakses pada 24 Juni 2017)

<https://minangkabaunews.com/artikel-11544-pemko-payakumbuh-bantah-rampas-tanah-warga-untuk-bangun-rth-bendungan-talawi.html> (diakses pada 17 Oktober 2017)

<https://payakumbuhkota.go.id/2017/02/06/soal-tanah-bendungan-talawi-pemko-tetap-pro-rakyat/> (diakses pada 17 Oktober 2017)

<https://metroandalas.co.id/berita-jalan-rth-bendungan-talawi-di-payakumbuh-disegel-warga-html> (diakses pada 17 Oktober 2017)

<https://www.padang-today.com/dibahas-dalam-hearing-komisi-c-dprd-payakumbuh-sikapi-persoalan-tanah-kaum-dt-simaro-nan-kuniang/>
(diakses pada 17 Oktober 2017)

https://koran.padek.co/read/detail/78427/Proyek_taman_talawi_bermasalah/
(diakses pada 30 November 2017)

<https://www.sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/mengenal-8-atribut-kota-hijau/> (diakses pada 5 Juni 2018)

